

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kinerja adalah hasil akhir yang dicapai manajemen dari aktivitas operasi yang sudah dilakukan (Ingram, 2006). Kinerja di atas rata-rata dapat dicapai perusahaan apabila perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif (Porter, 2008) dan perencanaan sistem kinerja (Kreklow, 2005). Sistem kinerja yang terbaik adalah yang menghubungkan antara kegiatan rutin dengan strategi yang akan dicapai (Chung, Yau, Sin, Tse, Chow and Lee, 2008).

West, Cronk, Goodman, dan Waymire (2010) menjelaskan pengukuran kinerja dalam konteks baru adalah akuntabilitas yang identik dengan akuntansi pertanggungjawaban. Kinerja ditentukan oleh tindakan yang diambil oleh manajemen. Pencapaian kinerja organisasi yang tinggi, harus ada kerja sama tim yang efektif dan hubungan yang jelas antar lintas departemen dalam suatu organisasi (Ingram, 2006) sehingga ketika kinerja organisasi menurun bisa dievaluasi penyebabnya, sehingga kesalahan yang sama tidak berulang kembali di masa yang akan datang.

Tan dan Lipe (1997) menemukan ketika kinerja perusahaan menurun manajer dianggap salah dalam mengevaluasi pengambilan keputusan, akibatnya manajer akan meningkatkan evaluasi kinerjanya melalui aktifitas yang selama ini kurang terkendalikan. Sebaliknya ketika kinerja perusahaan tinggi, manajer tidak melakukan penyesuaian evaluasi ke bawah untuk hasil yang kurang terkendali. Weiner (1985) menyarankan bahwa manajer perlu mengevaluasi tindakannya di masa lalu untuk menghindari kegagalan masa depan. Ini berarti tinggi rendah kinerja yang telah dicapai perlu dievaluasi kembali sehingga mampu meningkatkan kinerja di masa

yang akan datang.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah *intellectual capital*. *Intellectual capital* didefinisikan sebagai aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan ([Dalkir](#), [Wiseman](#), [Shulha](#), dan [Intyre](#), 2007; Blaise, Kerri, and Carson, 2007; Ericson and Call, 2008). *Intellectual capital* juga merupakan perbedaan nilai pasar dengan nilai buku (Cready *et al.*, 2010; Holland, 2009; Knight, 1999; Cezair, 2008). Terjadinya perbedaan nilai ini disebabkan adanya ide, pengetahuan dan penemuan baru yang diaplikasikan pada perusahaan (Ahangar, 2011). Semuanya ini tergabung dalam *intellectual capital*. *Intellectual capital* yang tinggi akan mampu menghasilkan kinerja keuangan yang tinggi juga (Ericson dan Call, 2008).

Elemen-elemen *intellectual capital* yang disepakati oleh para ahli terdiri dari terdiri dari 1. *Human capital*; 2. *Structural capital* dan 3. *Relational capital* ([Dalkir](#) et al. 2007; Blaise, Kerri, and Carson, 2007; Ahangar, 2011; Ericson and Call, 2008). *Relational capital* oleh peneliti lain diistilahkan dengan *social capital* atau *costumer capital* (Zalender,Hasiloglu dan Sezgin, 2008).

Chang dan Chen, (2012) menjelaskan untuk meningkatkan kinerja keuangan bukan hanya dengan *intellectual capital* saja, tetapi juga terkait dengan lingkungan sekitarnya serta kepedulian terhadap lingkungan. (Chen, 2008; Chang dan Chen, 2012). Chen (2008) menjelaskan penelitian bahwa tentang *intellectual capital* sudah cukup banyak tetapi penelitian yang mencoba mengeksplorasi *intellectual capital* dan pengelolaan lingkungan belum ada. Chen (2008) menjelaskan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dapat meminimalkan limbah produksi dan meningkatkan produktivitas. Perusahaan dapat menetapkan harga yang relatif tinggi untuk produk hijaunya sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dan

mendapatkan keunggulan kompetitif. Chen (2008) menjelaskan ini berarti dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan harus memperhatikan serta menjaga lingkungannya dengan kata lain perusahaan harus melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR). Singkatan ini selanjutnya akan selalu digunakan. Ide yang cemerlang ini kurang mendapat sambutan dari peneliti-peneliti lainnya. Fakta ini terlihat jelas sampai penelitian ini dilakukan setahu penulis Chang dan Chen saja yang menelitinya.

Di Indonesia berdasarkan PP No.47 tahun 2012 dijelaskan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berkaitan dengan sumber daya alam dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang tidak mengelola sumber daya alam dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi produk dari bahan baku menjadi barang jadi. Proses yang dilakukan akan menghasilkan limbah yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, dengan demikian seluruh perusahaan manufaktur harus melaksanakan kegiatan CSR. Kegiatan untuk melaksanakan kewajiban CSR tersebut harus dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Pengalaman dari Shell tahun 1995 di Negeria yang mencoba menghilangkan *flatform* minyak Brent Spar dan delapan aktifis lainnya berakibat sangat fatal. Perusahaan harus mengeluarkan dana lebih dari \$ 30 juta untuk mengembalikan reputasi namanya dan akhirnya menjalankan program “*Tell Shell*” (Nugroho, 2013).

Demikian juga perusahaan Nike diakhir tahun 1990 an yang menjalankan kondisi kerja yang buruk dengan gaji rendah, boikot produk Nike mendunia yang berefek anjloknya reputasi dan penjualan, akhirnya Nike menjalankan *code of conduct* untuk seluruh Nike dan pemasoknya (Nugroho, 2013).

Fenomena yang sama juga terjadi di Indonesia. PT. Sinar Mas yang tidak mau memperhatikan *CSR* nya, akhirnya pada tahun 2010 Burger King memutuskan kontrak pembeliannya dengan PT Sinar Mas dan sebelumnya sejumlah perusahaan seperti Unilever, Nestle, dan Kraft Foods telah melakukan tindakan yang serupa (CSR Indonesia, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai *Intellectual capital* menemukan hasil yang berbeda. *Intellectual capital* berpengaruh secara positif terhadap kinerja (Ericson dan Call, 2008; Ericson *et al.* 2007; Shabarati *et al.* 2010; Helena, Pedro, dan Jardon, 2010; Huang dan Wu, 2010); Li, Pike, dan Haniffa (2008); Orens, Aerts, dan Nadine (2009). Pengaruh *Intellectual capital* yang berbeda juga ditemukan oleh Maditinos, Sairidis dan Theriou (2011) meneliti hubungan antara komponen *Intellectual capital* dengan kinerja keuangan di Bursa Pasar Yunani hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara *Intellectual capital* dan kinerja keuangan dan pasar saham. Blaise *et al.* (2007) melakukan penelitian pada 150 buah perusahaan yang berteknologi tinggi justru menemukan hal yang berlawanan dan mengatakan *intellectual capital* berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Perbedaan temuan ini disebabkan berbedanya konsep dalam menghitung *intellectual capital* tersebut. Blaise *et al.* (2007) menghitung pengeluaran untuk *intellectual capital* sebagai biaya, akibatnya perusahaan merugi. Efek dari semua ini adalah manajemen mengurangi pengungkapannya untuk mempertahankan

keunggulan kompetitifnya (Blaise *et al.*, 2007), sedangkan peneliti lainnya menganggapnya sebagai aset perusahaan. Perbedaan pendapat ini disebabkan belum adanya kesepakatan para ahli dalam menentukan konsep *intellectual capital* ini.

Pulic (1998) mengemukakan konsep yang sedikit berbeda. Perbedaan terjadi pada waktu menghitung nilai dari *intellectual capital* itu sendiri. Pulic menjelaskan komponen *intellectual capital* ini terdiri dari: a. *Capital employed efficiency (CEE)*; b. *Human Capital Efficiency (CEE)*; c. *Structural capital efficiency (SCE)*, selanjutnya singkatan ini akan selalu digunakan dalam penelitian ini.. Pendapat Pulic ini di dukung oleh peneliti-peneliti lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pulic (1998) menggunakan data keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan. Perhitungan *Intellectual capital* yang dilakukan Pulic (1998) dihitung berdasarkan kinerja yang telah dicapai perusahaan dan tidak berdasarkan pendapat manajemen.

Di Indonesia, *Intellectual capital* sudah mulai mendapat perhatian. *Intellectual capital* merupakan merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. Terbitnya PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif (IAI, 2002). Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit namun dapat diartikan bahwa *intellectual capital* sudah diakui tapi juga masih dalam tahap pembicaraan yang hangat.

*Intellectual capital* adalah aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan, sebagai aset tidak berwujud maka *Intellectual capital* ini tidak nampak dalam

laporan keuangan dan yang dicatat oleh perusahaan hanyalah berdasarkan nilai buku saja. Pada dasarnya nilai buku hanyalah puncak gunung es dari sebuah kekayaan, nilai riilnya ada pada *Intellectual Capital* (Knight, 1999). Brown (2002) menjelaskan nilai *Intellectual Capital* dibagi dengan nilai buku hasilnya adalah nilai perusahaan diluar aset fisik. Hal ini dipertegas oleh Genuske (2001) dengan memberikan contoh Bill Gates sebagai orang terkaya hanya memiliki sedikit aset riil, sedangkan yang terbesar adalah *Intellectual Capital*.

Kelemahan dari akuntansi konvensional ini belum mendapat tanggapan dari *Financial Accounting Standard Board (FASB)* dan *International Accounting Standard Board (IASB)*. Hal ini terlihat belum adanya penyajian *Intellectual Capital* dalam laporan keuangan sekarang ini. Penyajian laporan keuangan sekarang dianggap mempunyai kelemahan, karena nilai aset utama perusahaan yang berbentuk aktiva tak berwujud (*Intellectual Capital*) hilang dari nilai buku (Cezair, 2008). Lev dan Zarowin (1999) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disusun harus secara sistematis dimodifikasi sehingga dapat mencerminkan perubahan dalam kondisi ketidakpastian, karena tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dan membantu mereka dalam membuat keputusan (Lev dan Zarowin, 1999).

Para ahli, peneliti, dan akademisi mencoba meneliti, bereksperimen dan berusaha menemukan pengukuran *Intellectual Capital*. Model yang mereka ukur menggunakan model akuntansi dan manajemen yang masih menggunakan laporan keuangan (Komnenic dan Mikic, 2009). Para peneliti lain mencoba untuk melihat perspektif lain yang jauh akuntansi konvensional. Tujuannya adalah membuat penilaian yang lebih sesuai dengan pasar (Komnenic dan Mikic, 2009). Keterbatasan laporan keuangan konvensional mendorong mereka untuk

mengungkapkan informasi penting lainnya dengan menciptakan teknik-teknik baru untuk mengukur *Intellectual Capital*, sehingga diperlukan laporan tambahan sebagai *Supporting Report*.

Penelitian mengenai *CSR* juga menemukan hasil yang berbeda. Ameer dan Othman (2012); Clacher dan Hagendorff (2012); Yip dan Staden (2011); Jo dan Harjoto (2012); Choi, Kwak, Choe (2010) menemukan adanya pengaruh yang positif antara *CSR* dengan kinerja keuangan perusahaan, sebaliknya Laan, Ees, Itteloostuijn (2008); Baird dan Pinar (2012) justru menemukan pengaruh yang negatif. Temuan lain yang dikemukakan oleh Clacher dan Hagendorff (2012) menemukan bahwa pasar memang merespon *CSR* tetapi belum bisa disimpulkan bahwa reaksi pasar positif terhadap *CSR*.

Salazar *et al.* (2012) menjelaskan adanya perbedaan temuan ini disebabkan para peneliti hanya melihat *CSR* dalam perusahaan dan kemudian menghubungkannya dengan kinerja keuangan. Salazar (2012) menduga para peneliti tersebut hanya melihat dari laporan porto folio proyek dan mengukur hasil dari *CSR* tersebut. Definisi *CSR* seharusnya adalah praktek yang dilakukan oleh perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab bisnis terhadap masyarakat luas sehingga kinerja *CSR* dapat diukur dan dievaluasi dan tidak dikaitkan dengan laporan keuangan (Salazar *et al.* 2012).

Komisaris independen merupakan bagian dari direktur non eksekutif (dewan komisaris). Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada dewan direksi. Tujuannya agar perusahaan tidak keluar dari rel yang sudah ditentukan sehingga terjaga kesinambungan perusahaan dalam jangka panjang. Dewan komisaris ini diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham

(RUPS).

Perusahaan yang menjual sahamnya di Bursa Efek, diwajibkan memiliki komisaris independen. Komisaris independen adalah komisaris yang diangkat oleh RUPS yang tidak terafiliasi dengan perusahaan (OJK, 2014), oleh sebab itu personal yang diangkat itu harus berasal dari luar perusahaan, selanjutnya dijelaskan jumlah minimal komisaris independen ini 30% dari total dewan komisaris yang ada. Fungsi dan tugas komisaris independen ini sama dengan fungsi komisaris lainnya, jadi komisaris independen itu bagian dari komisaris itu sendiri.

Undang-undang perseroan terbatas no.40 tahun 2007 (UUPT 2007) yang berlaku di Indonesia sendiri tidak mengatur keberadaan komisaris independen ini tetapi Bursa Efek Indonesia (BEI) justru mewajibkannya. Hal ini terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK tahun 2014. Konsep ini menjelaskan bahwa OJK dan BEI tidak menghendaki tujuan perusahaan hanya untuk kepentingan *shareholder* saja tetapi juga mengakomodasi kepentingan *stakeholder* salah satunya adalah masyarakat. Keberadaan komisaris independen ini pada perusahaan *public* menjelaskan setiap keputusan yang diambil perusahaan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder*.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang komisaris independen juga memperlihatkan hasil yang berbeda. Temuan Abidin, Mustaffa, Jusoff (2009) menemukan komisaris independen mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan *intellectual capital* yang akhirnya mengarah ke kinerja keuangan. Ventila dan Gerghina (2013) menemukan jumlah persentase komisaris independen juga berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Hasil temuan penelitian Wang (2014) sedikit berbeda, pengaruhnya memang positif tetapi tidak signifikan.



Temuan yang berbeda ditemukan oleh Bhagat dan Black (1999) dalam Abidin *et al.* (2009) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak selalu berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dah, Beyrouti dan Showeiry (2013), Lawrence dan Stapledon (1999), Agrawal dan Knoeber (1996) dalam Abidin *et al.* (2009) lebih menegaskan dalam temuannya yang menemukan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Falaye (2014), juga menemukan pengaruh yang negatif tetapi disaat kinerja manajemen tinggi maka pengaruh yang negatif ini akan semakin berkurang.

Maki, Lodhi, Rohra (2009) menjelaskan dewan komisaris merupakan bahagian dari *human capital* yang dimiliki oleh perusahaan, fungsinya mengawasi efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan. Maki *et al.* (2009) meragukan kemampuan dewan komisaris tersebut. Keraguan tersebut Maki *et al.* (2009) diwujudkan dalam penelitiannya yang menemukan *Intellectual capital* berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh dewan komisaris.

Penelitian awal yang pernah peneliti lakukan pada 58 perusahaan manufaktur tentang *intellectual capital* terhadap kinerja yang menggunakan metode Pulic menemukan *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. *Intellectual capital* yang dimiliki perusahaan di Indonesia pada penelitian tersebut relatif tinggi. Appuhami (2005) menjelaskan semakin tinggi *intellectual capital* yang dimiliki perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan juga semakin tinggi.

Penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan tersebut memperlihatkan sebahagian besar kinerja keuangan *Return On Asset (ROA)* yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia rendah. Istilah rendah yang peneliti maksudkan di dalam penelitian ini karena sebahagian besarnya hanya

mencapai satu digit.

Penelitian ini juga menggunakan variabel *CSR* dan komisaris independen. Penggunaan variabel *CSR* didasarkan pada Undang-Undang tentang perseroan terbatas tahun 2007 No. 40 yang mewajibkan perusahaan terbatas untuk melaksanakan program *CSR* ini, di samping itu penelitian ini juga menggunakan variabel komisaris independen. Alasan Penggunaan variabel ini disebabkan adanya aturan dari organisasi jasa keuangan (OJK) no.33/POJK.04/2014 yang mewajibkan adanya komisaris independen dalam perusahaan khususnya pada perusahaan *public*. Minimal jumlahnya 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris.

Rendahnya kinerja ROA yang dicapai perusahaan *public*, sementara itu *intellectual capital* yang dimiliki perusahaan relatif tinggi. Temuan ini sangat berlawanan dengan apa yang telah ditemukan Appuhami (2005) yang menjelaskan makin tinggi *intellectual capital* maka kinerja juga makin tinggi oleh karena itu peneliti ingin lebih mengetahui lebih mendalam mengapa hal tersebut bisa terjadi di Indonesia.

Penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini sedikit berbeda dengan Maki *et al.* (2009). Penelitian Maki *et al.* (2009) tersebut melihat pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan yang salah satunya dimoderasi oleh dewan komisaris. Penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini menggunakan komisaris independen sebagai variabel independen. Hal ini disebabkan komisaris independen adalah pihak luar yang independen, sebagai pihak yang independen diharapkan mampu untuk membela kepentingan *stakeholder* yang diwakilinya.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen (2008). Chen (2008) menemukan *intellectual capital* dan *CSR* berasosiasi positif

terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menambahkan variabel komisaris independen, dengan demikian terlihat bahwa penelitian ini adalah hasil dari pengembangan penelitian Chen (2008) dan penelitian Maki *et al.* (1999)

Dimasukkannya variabel komisaris independen dalam penelitian ini adalah untuk melihat sampai dimana pengaruh komisaris independen tersebut mampu membela kepentingan *stakeholdernya*. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan pihak yang diwakilinya. Komisaris independen mewakili kepentingan *stakeholder* sedangkan komisaris biasa mewakili kepentingan *shareholdernya*.

Pengukuran *intellectual capital* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yang dikemukakan oleh Pulic (2004). Elemen-elemen *intellectual capital* yang telah dikemukakan Pulic yaitu *capital employed efficiency (CEE)*, *human capital efficiency (HCE)*, dan *structural capital efficiency (SCE)*.

Keputusan penggunaan alat ukur ini disebabkan alat ukur yang lain masih subjektif (Pulic, 1998). Pulic (1998) menjelaskan penggunaan *EVA* hanya mampu menghitung dari aset fisik saja sehingga aset non fisik terabaikan, *EVA* tidak mampu menjawab pertanyaan bagaimana menambah keuntungan dari *intellectual capital* (Knight, 1999). Penggunaan monitor aset tidak berwujud (*intangible asset monitor*) oleh Sveiby tahun 1997 juga mempunyai kelemahan, yaitu pada saat mengukur profit untuk profesional, seharusnya semakin banyak profesional yang digunakan perusahaan maka profit yang dihasilkannya juga harus semakin tinggi, tapi faktanya semakin rendah. Jadi terlihat hubungan profesional dengan karyawan menjadi tidak wajar. Penggunaan *scandinavia navigator* oleh Edvinsson dan Malone juga mempunyai kelemahan dalam penggunaan indikatornya, walaupun sudah ada 169 indikator untuk mengukur *intellectual capital* namun harus ada indikator umum yang harus ditetapkan untuk mengukur keberhasilan tersebut (Pulic, 1998).